

JUDUL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2013

Model Optimalisasi Peran Koperasi Lepp-M3 Nusa Barong dalam Memberdayakan Nelayan Tradisional di Kampung Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

(Drs. Kusnadi, M.A.; Dr. Agus Sariono, M.Hum., Lembaga Penelitian, Universitas Jember, 2013, ix + 58 halaman).

Fakultas Sastra

ABSTRAK

PENELITIAN INI ADALAH PENELITIAN KUALITATIF. TUJUAN PENELITIAN ADALAH MENGOPTIMALKAN PERAN KOPERASI LEPP-M3 NUSA BARONG DALAM MEMBERDAYAKAN NELAYAN TRADISIONAL YANG RENTAN MISKIN. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA PELUANG PEMBERDAYAAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN. SYARATNYA ADALAH MASYARAKAT NELAYAN HARUS MEMBENTUK KELEMBAGAAN SOSIAL SEBAGAI SARANA MEDIASI DENGAN KOPERASI. DI INTERNAL KOPERASI JUGA HARUS DIBENTUK UNIT ORGANISASI BARU YANG AKAN MENGELOLA PINJAMAN KREDIT NELAYAN. INTERVENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JUGA DIPERLUKAN. KERJASAMA NELAYAN DAN KOPERASI DENGAN DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH AKAN BERKONTRIBUSI EFEKTIF TERHADAP UPAYA MENGOPTIMALKAN PERAN KOPERASI, MENINGKATKAN PARTISIPASI NELAYAN BERKOPERASI, MENGATASI KEMISKINAN, DAN MEMBERDAYAKAN NELAYAN SECARA BERKELANJUTAN.

KATA KUNCI: NELAYAN, KOPERASI, KEMISKINAN, PINJAMAN KREDIT, PEMBERDAYAAN.

RINGKASAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan dan difokuskan pada sebuah kampung nelayan, yaitu di Kampung Getem, Dusun Kalimalang, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Penelitian ini didasari oleh pertanyaan, “Mengapa Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong yang didirikan untuk memberdayakan nelayan justru belum menjadikan nelayan di Kampung Getem sebagai nasabah koperasi sampai saat ini?” Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model optimalisasi peran Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong dalam memberdayakan nelayan tradisional di Kampung Getem. Model yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai sarana yang menjembatani agar nelayan berpartisipasi dalam kegiatan perkoperasian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan emik. Data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan penelusuran dokumen/arsip. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi. Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Informan ditetapkan berdasarkan teknik *snow ball* (bola salju) dan jumlah informan bersifat relatif, yakni disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan data. Analisis data dilakukan secara *thick description* (deskripsi mendalam), dengan mengonstruksi relasi dan keterpaduan antargejala, dan melakukan interpretasi sehingga diperoleh pemahaman makna yang holistik. Kegiatan analisis data dilaksanakan sejak awal observasi (*grand tour observation*) sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan pengelolaan dana ekonomi produktif Program PEMP 2003 yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong telah menciptakan kesenjangan hubungan antara masyarakat nelayan di Kampung Getem dengan lembaga koperasi. Pinjaman dana ekonomi produktif kepada kelompok-kelompok nelayan yang seharusnya digulirkan dan dikembangkan mengalami kemacetan total. Meskipun program ini gagal memperkuat peran Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong karena kemacetan pengembalian pinjaman kredit, tetapi memberi manfaat positif bagi masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan mengembangkan usahanya.

Dengan kesiapan sarana produksi yang lebih baik daripada kondisi sebelum 2003 telah memberi kesempatan nelayan untuk meraih produksi perikanan laut secara maksimal pada masa

antara tahun 2004-2006. Setiap hari melaut, tingkat pendapatan nelayan relatif tinggi, sehingga mereka bisa memperbaiki rumah, membeli perabotan rumah tangga, dan melengkapi sarana produksi. Kondisi perumahan nelayan yang relatif baik saat ini merupakan hasil dari kegiatan melaut ketika terjadi booming produksi perikanan laut (lemuru) pada tahun 2004-2006. Masa-masa berikutnya hingga sekarang (2013) merupakan masa suram dalam usaha penangkapan. Tingkat pendapatan nelayan menurun dan tidak pasti setiap kali melaut. Tekanan-tekanan sosial ekonomi sering melanda rumah tangga nelayan.

Sejak kegagalan Program PEMP 2003, sebagian nelayan enggan atau takut berkomunikasi dengan pihak koperasi karena pinjaman yang diterima belum dilunasinya. Meskipun sebagian besar nelayan memandang penting menjadi anggota koperasi karena akan mempermudah mereka memperoleh pinjaman modal usaha, tetapi kekhawatiran tidak bisa mengangsur pinjaman tetap ada, mengingat besaran pendapatan dari kegiatan melaut sehari-hari tidak dapat dipastikan. Sebaliknya, pihak koperasi juga mengambil jarak dengan nelayan dan tidak mudah lagi memberi pinjaman karena *track record* nelayan yang kurang bertanggung jawab. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, nelayan bertumpu pada kebaikan hati pedagang perantara atau pedagang pengepul (*pangamba'*) untuk meminjam modal. Pinjaman ini bersifat mengikat nelayan karena harus menjual hasil tangkapannya kepada pedagang perantara. Nelayan tidak bisa secara leluasa menjual hasil tangkapannya kecuali jika nelayan sudah melunasi utang-utangnya kepada pedagang perantara.

Pada tahun 2006, Program PEMP memperkuat kembali permodalan Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Bank Bukopin Jember dengan sistem swamitramina. Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong mendapat hibah dana sekitar Rp 1 milyar lebih. Dana dikelola dan diputar untuk melayani kebutuhan modal usaha nasabah koperasi dari berbagai kelompok pekerjaan/matapencarian. Mereka adalah nelayan, petambak, pedagang, pelaku usaha kecil-menengah, dan sebagainya. Dari kelompok nelayan tersebut, tidak banyak nelayan dari Kampung Getem yang menjadi nasabah koperasi. Sebagian besar nelayan di Kampung Getem masih menanggung tunggakan pinjaman yang diberikan melalui Program PEMP 2003.

Setelah berjalan sepuluh tahun (sampai tahun 2013), kesenjangan hubungan antara nelayan di Kampung Getem dengan lembaga koperasi harus di atasi dalam rangka untuk membuka akses nelayan terhadap kemudahan memperoleh modal usaha. Dasar pemikiran untuk

menghubungkan kembali nelayan ke koperasi adalah: (1) Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong dibentuk dalam kerangka untuk memberdayakan nelayan tradisional, yang kondisi ekonominya terbatas; (2) tingkat kebutuhan akan modal usaha di sektor perikanan tangkap cukup besar, sedangkan kemampuan nelayan sangat terbatas; dan (3) lembaga koperasi sangat efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat pesisir.

Upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga koperasi dalam memberdayakan nelayan dan mengatasi keterbatasan sosial ekonomi yang dihadapi dapat dilakukan jika terjadi komitmen di kalangan nelayan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kegiatan berkoperasi dan dukungan pengelola lembaga koperasi. Tekad nelayan yang demikian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pinjaman yang diberikan kepada nelayan dapat dikelola dengan baik dan memberi manfaat. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada nelayan tentang pentingnya menjadi nasabah koperasi yang baik dan bertanggung jawab sangat diperlukan.

Selain hal di atas, di masyarakat nelayan harus dibentuk kelembagaan sosial, yang berupa Forum Komunikasi Nelayan (atau nama yang lain), sebagai institusi mediasi yang menjembatani kepentingan nelayan dengan pihak koperasi. Lembaga mediasi ini berperan juga dalam hal merekomendasikan nelayan-nelayan yang layak memperoleh pinjaman kredit koperasi dan membantu angsuran pengembalian pinjaman berjalan lancar. Dengan demikian, lembaga mediasi ini dapat membantu peran koperasi dalam mengelola pinjaman kredit yang diberikan kepada nelayan.

Hal yang sama juga harus dilakukan pembenahan di internal di lembaga koperasi. Pembenahan tersebut meliputi pemantapan koperasi sebagai lembaga yang mengambil peran di depan dalam pemberdayaan nelayan, peningkatan kualitas kompetensi pengelolanya tentang konsepsi pemberdayaan masyarakat nelayan, dan penyiapan unit organisasi baru yang secara khusus akan menangani masalah simpan-pinjam untuk pemberdayaan ekonomi nelayan. Pembenahan tersebut dalam rangka mengoptimalkan peran Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong memberdayakan nelayan dan mengatasi kemiskinan yang mendera mereka.

Unit organisasi baru di internal koperasi tersebut akan dikelola oleh 2-3 orang yang bertanggung jawab langsung ke manajer. Pengelola menetapkan aturan-main peminjaman, dengan memperhatikan masukan dari Forum Komunikasi Nelayan. Sistem yang dibangun oleh unit organisasi baru ini harus mengakomodasi berbagai aspirasi nelayan, sehingga tidak memberatkan nelayan. Karena sistem ini dibangun berbasis pemikiran pemberdayaan, maka

operasional sistem tentu saja harus memperhatikan karakteristik ekonomi perikanan, di samping tetap memantapkan sistem *bankable* terhadap nasabah koperasi. Unit organisasi baru ini akan membangun sistem yang berbeda dengan sistem yang beroperasi sekarang di lembaga koperasi, yang cenderung berorientasi bisnis (*profit*).

Untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan model yang ditemukan dalam kegiatan penelitian, diperlukan perubahan sikap yang saling bersinergi antara nelayan dan lembaga koperasi. Dalam hal ini, nelayan harus memiliki “hasrat yang kuat untuk berubah dan berkembang” sehingga memiliki kemampuan meningkatkan kualitas kehidupan dan cerdas dalam mengembangkan usaha penangkapan, sehingga tingkat pendapatannya terus stabil. Penghasilan yang stabil atau meningkat dari waktu ke waktu akan memudahkan nelayan menyiapkan dana yang diperlukan untuk mengangsur cicilan kredit koperasi. Dari pihak lembaga koperasi, koperasi harus kembali ke jati dirinya sebagai pihak yang ikut mengatasi kemiskinan dan memberdayakan mereka. Artinya, sikap simpati dan empati koperasi terhadap nasib nelayan tradisional harus ada agar koperasi memiliki keberanian untuk memberdayakan masyarakat nelayan.

Pada sisi lain, di luar peran lembaga koperasi dan institusi nelayan, intervensi kebijakan pembangunan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung peningkatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir, yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, penguatan modal usaha koperasi untuk merespons peningkatan kredit nasabah. Melalui APBD, pemerintah kabupaten dapat melakukan penyertaan modal ke koperasi dan meningkatkan kualitas pengetahuan SDM pengelolanya melalui kegiatan pelatihan yang relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kedua, pembangunan infrastruktur jalan desa/dusun, dari Dusun Krajan ke Dusun Kalimalang-Kampung Getem. Jalan yang selama ini ada sebagian besar masih berupa jalan tanah dan berbatu yang mengganggu mobilitas manusia, barang, dan jasa. Kondisi demikian yang membuat Kampung Getem seperti daerah terisolasi, sehingga tidak menarik orang untuk datang ke Kampung Getem. Padahal, kawasan pesisir di Kampung Getem memiliki daya tarik wisata yang memungkinkan penduduknya untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru.

Ketiga, menyelenggarakan pelatihan ketrampilan kewirausahaan (*life skill*) bagi isteri-isteri nelayan dan generasi muda nelayan agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai

untuk mengelola potensi sumberdaya ekonomi lokal, sehingga tercipta diversifikasi usaha rumah tangga nelayan yang tidak hanya bergantung dari kegiatan melaut.

Keempat, tidak semua nelayan memiliki jenis-jenis alat tangkap, sehingga memungkinkan nelayan dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Dalam hal ini, program bantuan alat tangkap sangat diperlukan untuk membantu stabilitas perolehan pendapatan nelayan sepanjang tahun.

Jika intervensi kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada tiga hal. Pertama, sumber-sumber pendapatan nelayan semakin beragam, sehingga akan tercipta stabilitas pendapatan rumah tangga. Kedua, dampak dari kondisi demikian, partisipasi nelayan dalam kegiatan berkoperasi akan semakin baik, karena kekhawatiran tidak bisa membayar angsuran pinjaman koperasi jika hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan melaut bisa teratasi. Ketiga, peluang rumah tangga nelayan meningkatkan kesejahteraan hidupnya terbuka lebar. Dengan demikian, lembaga koperasi akan lebih optimal dalam memberdayakan nelayan secara berkelanjutan dan mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sering dihadapi oleh rumah tangga nelayan.